ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk menyimpan dan menjaga protokol Notaris sebagai dokumen negara. Namun, dalam situasi di mana Notaris meninggal dunia, tanggung jawab atas penyerahan protokol Notaris beralih kepada ahli warisnya. Permasalahan muncul ketika ahli waris tidak memahami kewajibannya atau terjadi kendala dalam proses penyerahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab ahli waris Notaris dalam penyerahan protokol Notaris setelah Notaris meninggal dunia, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tanggung jawab ahli waris apabila tidak menyerahkan protokol Notaris yang sudah meninggal, dan membahas peran MPD serta akibat hukum dalam hal ahli waris tidak menyerahkan protokol Notaris melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder. Analisis data penelitian ini menggunakan kualitatif dan dari hasil analisis data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif dan disajikan dalam penulisan hukum.

Hasil penelitian ini membahas tanggung jawab ahli waris Notaris dalam penyerahan peralihan protokol Notaris yang telah meninggal dunia. Berdasarkan hasil penelitian, ahli waris memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan protokol Notaris dalam batas waktu 30 hari, namun dalam praktiknya masih terdapat keterlambatan dengan berbagai alasan, seperti ingin tetap mengelola akta yang belum selesai atau menunggu pengangkatan sebagai Notaris. Keterlambatan ini dapat menghambat pelayanan hukum dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dokumen. Tanggung jawab ahli waris dalam penyerahan protokol mencakup aspek administrasi, perdata, dan pidana, dengan sanksi yang dapat berupa teguran, gugatan perdata, hingga pertanggungjawaban pidana jika terjadi penyalahgunaan atau pemalsuan protokol. Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewenangan untuk mengawasi penyerahan protokol, tetapi terbatas pada pemberian peringatan tanpa tindakan hukum lebih lanjut jika peringatan tidak diindahkan. Kendala yang dihadapi dalam proses ini meliputi kurangnya pemahaman ahli waris, keterbatasan tempat penyimpanan oleh Notaris penerima, serta minimnya pendampingan bagi ahli waris. Akibat keterlambatan penyerahan protokol dapat mencakup sanksi administratif, tuntutan hukum, serta dampak terhadap keabsahan dokumen dan potensi sengketa hukum.

Saran mencakup edukasi bagi Notaris untuk memberikan pemahaman kepada ahli waris, serta pembentukan tim pendampingan oleh organisasi Notaris. Penyerahan protokol Notaris yang meninggal adalah kewajiban hukum ahli waris demi kelancaran pelayanan hukum. MPD berperan dalam pengawasan, bimbingan, dan penegakan sanksi. Notaris penerima harus siap mengelola protokol, sementara pemerintah perlu meninjau regulasi terkait. Kolaborasi MPD, Kementerian Hukum dan HAM, serta INI diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.

Kata Kunci: Notaris, Ahli Waris, Protokol Notaris, Tanggung Jawab Hukum.

ABSTRACT

Notaries, as public officials, have the obligation to store and maintain Notary protocols as state documents. However, in situations where the Notary passes away, the responsibility for handing over the Notary's protocol shifts to their heirs. Problems arise when the heirs do not understand their obligations or when there are obstacles in the handover process. This research aims to analyze the responsibilities of Notary heirs in the handover of Notary protocols after the Notary's death, as well as to identify the obstacles faced in its implementation. The issue discussed in this research is the responsibility of the heirs if they do not submit the protocol of the deceased Notary, and it examines the role of the MPD as well as the legal consequences if the heirs do not submit the Notary's protocol within the specified time frame.

This research uses an empirical juridical approach method, with descriptive-analytical specifications. The sources and types of data used in this research include primary data in the form of interviews and secondary data. The data analysis in this research uses qualitative methods, and from the results of the collected data analysis, conclusions are drawn using inductive reasoning and presented in legal writing.

The results of this study discuss the responsibilities of Notary heirs in the transfer of Notary protocols after the Notary has passed away. Based on the research findings, heirs have a legal obligation to submit the Notary's protocol within a 30-day period, but in practice, there are still delays for various reasons, such as wanting to continue managing unfinished deeds or waiting for appointment as a Notary. This delay can hinder legal services and potentially lead to document misuse. The responsibility of heirs in the submission of protocols includes administrative, civil, and criminal aspects, with sanctions that can range from warnings, civil lawsuits, to criminal liability in cases of protocol abuse or forgery. The Regional Supervisory Council (MPD) has the authority to oversee the submission of protocols, but it is limited to issuing warnings without further legal action if the warnings are ignored. The obstacles faced in this process include the lack of understanding among the heirs, limited storage space by the receiving Notary, and minimal assistance for the heirs. The consequences of the delayed submission of the protocol may include administrative sanctions, legal claims, as well as impacts on the validity of documents and potential legal disputes.

The recommendation includes education for Notaries to provide understanding to the heirs, as well as the formation of a support team by the Notary organization. The handover of the deceased Notary's protocols is a legal obligation of the heirs for the smooth provision of legal services. MPD plays a role in supervision, guidance, and enforcement of sanctions. The receiving notary must be ready to manage the protocol, while the government needs to review the related regulations. Collaboration between MPD, the Ministry of Law and Human Rights, and INI is necessary to ensure compliance with the regulations.

Keywords: Notary, Heir, Notary Protocol, Legal Responsibility.